

DAFTAR PUSTAKA

a. Literatur Buku

- A. G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik* Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar -Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agung, Gregorius. 2000. *Membuat Homepage Interaktif Dengan CGI/Perl*. Jakarta: PT. Elex Media Koputindo.
- Alexander F.K Sibero. 2013. *Web Programing Power Pack*.mediaKom. Yokyakarta.
- Darmawan Deni & Kunkun Nur Fauzi. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbin Gaya Media
- Islamy,M.Irpan.1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. (terjemahan): Jakarta. Rajawali Press.
- Joko Pramono. 2020. *Implementasi Dan Evaluasi kebijakan publik*. Solo: UNISRI Press
- Mazmanian, D.A and Sabatier, P.A. 1983. *Implementation and public policy*. London:Scot, Foresman and company.
- M.Hapiz. 2021. *Transformasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
- Maulidiah. 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Bandung: CV. Indra Prahasta
- Moleong J. Lexy .2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sibero, Alexander F.K. 2013. *Web Programing Power Pack*. Yogyakarta: Mediakom

Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Dalam Kesatuan*. Yogyakarta : Yogyakarta Pustaka

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Yulianto Kadji. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Pres

b. Peraturan-peraturan dan Dokumen

Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-goverment.

Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2006 tentang Tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Peraturan Daerah Kota Bandung No 14 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 29 tahun 2010 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bab XXI bertajuk Inovasi Daerah pasal 386 hingga pasal 390 UU 23/2014

Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Arsip Kecamatan Cobleng 2018 dan 2020

c. Jurnal dan Disertasi

Hertati, D. (2020). Model Implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web bagi pemerintahaN desa di Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 55-62.

Karniawati, Nia. 2018. E-Government dalam Pelayanan Perijinan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Jawa Barat. Disertasi. Unpad: Bandung.

Karniawati Dan Yuni Dwi Indriyani, N. (2013). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup). *Majalah Ilmiah UNIKOM*.

- Karniawati, N., Ibnu Redjo, S., Suwaryo, U., & Mulyawan, R. (2017). e-Government in Public Service: Studies on Tangibles Aspects in Licensing Services at Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Office, West Java, Indonesia. *Asian Political Science Review*, 1(1).
- Karniawati, N., & Rahmadani, R. (2011). Analisis Kebijakan Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)(Suatu Studi Pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat). *Majalah Ilmiah UNIKOM*.
- Kurniasih, D., Fidowaty, T., & Sukaesih, P. (2013). Pengaruh implementasi kebijakan e-government terhadap kinerja aparatur kota cimahi. *Sosiohumaniora*, 15(1), 6-14.
- Kuswandi, A., Kurniasih, D., & Karniawati, N. (2018). Pelatihan e-government bagi aparat pemerintah desa di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 2(1).
- Nurfarida, E. (2014). Implementasi Web Service untuk Sistem Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. *Jurnal Informatika dan Multimedia*, 6(1), 21-24.
- Parsaorantua, P. H., Pasoreh, Y., & Rondonuwu, S. A. (2017). Implementasi teknologi informasi dan komunikasi (studi tentang web e-government di kominfo kota manado). *Acta Diurna Komunikasi*, 6(3).
- Pratiwi, C. S. (2018). Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Open Government Di Provinsi Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 2(1), 109-126.
- Richard E Matland. (1995) *Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity Conflict Model of Policy Implementation*. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, Vol. 5, No. 2 Apr, pp. 145-174.
- Rohmawati, T., & Winata, H. (2021). Information Technology for Modern Marketing. *International Journal of Research and Applied Technology (INJURATECH)*, 1(1), 90-96.
- Sopyani, A. L. (2019). Implementasi Electronic Public Relations melalui Website Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Reputation: Jurnal Hubungan Masyarakat*, 2(2), 181-200.
- Sitokdana, M. N. (2015). Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura. *Jurnal Buana Informatika*, 6(4).

- Sholeh, N. R. M., Muchsin, S., & Anadza, H. (2021). Implementasi Model Richard Matland Dalam Kebijakan Home Learning Di Kondisi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo). *Respon Publik*, 15(9), 66-73.
- Usmanto, B., Immawan, R., Fauzi, F., Sari, K. P., & Mahdi, M. I. (2018). Implementasi Web Mobile Sebagai Media Informasi Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pirngadi. *Jurnal Keteknikan dan Sains (JUTEKS)*, 1(1), 32-40.
- Ulfah, S. C. (2021). Implementasi Aplikasi Buku Kas Umum Berbasis Website Di Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. *Pengabdian Pada Masyarakat Sistem Informasi Akuntansi*, 1(1), 6-10.
- Vaughan, R., Busthomi, R. H., & Putri, A. A. (2021). Implementasi Kebijakan E-Government Melalui Website Subang. Go. Id Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. *Syntax Idea*, 3(6), 1431-1441.
- Windyaningrum, R., & Rubiyasih, A. (2016). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa. *Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Yazid, T. P. (2015). Implementasi Cyber Public Relations Melalui Pengelolaan Website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS)*, 4(2), 160-173.

Rujukan Elektronik

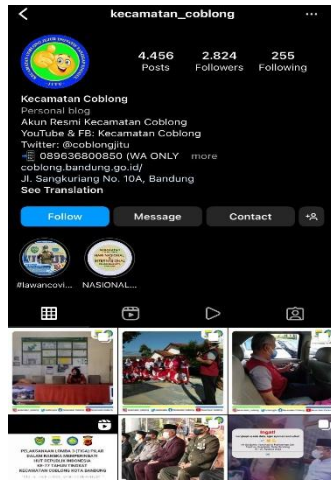
Website Kecamatan Coblong <https://coblong.bandung.go.id/>

Website PPID Kota Bandung <https://ppid.bandung.go.id/>

Twitter : @coblongjitu



Instagram : @kecamatan_coblong



Facebook : Kecamatan Coblong

